

# **IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA PEMILU 2009**

Oleh;

**\*Johanes**

**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**E-mail : juan\_khioe@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

**Political Party is single united Ideological unit which grown up and expand through living in democratic system of society. The existence of Political party proved very important to build equality and welfare of society. Partai Amanat Nasional(PAN) as one of politic party which involved in year 2009 General Election has strategical position to participated in increasing and development of Riau Province, because in 2009 Election PAN won large portion in Riau Parlementary seat. These Journal provide analytical view action of PAN programs after 2009 General Election and explain PAN programs as its Political Party form. These Journal using Qualitative and Analitic Descriptive view of method research. The result of research showed us PAN programs included active involvement in Election of Riau Governor and other strategic programs which synchronized with Riau Province development.**

**Key Word: *Political Party, Program and General Election.***

## **PENDAHULUAN**

Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang proses dalam memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini dinegara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai.

Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Di negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik (Miriam Budiardjo, 2006: 160).

Pemilu 2009 mengantarkan Partai Amanat Nasional (dalam konteks tulisan ini) sebagai salah satu partai politik yang meraih suara cukup dominan dengan menempatkan 6 (enam) orang kadernya di kursi legislatif DPRD Provinsi Riau. Maka berkaitan dengan itu, pasca Pemilu 2009 PAN ingin terlibat aktif dalam

mengintegrasikan pembangunan daerah dengan program-program strategis PAN yang tetap sinkron dengan ideologi PAN sebagai partai politik yang terbuka dan tetap dijalar reformasi.

Maka menilik kondisi itu, tulisan ini ingin melihat peran strategis PAN pasca pemilu 2009 baik dalam helat politik Pilkada maupun peningkatan kelembagaan PAN secara menyeluruh di Provinsi Riau dengan judul **Implementasi Program Aksi Partai Amanat Nasional Pasca Pemilu 2009 di Provinsi Riau.**

## **PERUMUSAN MASALAH**

Adapun perumusan masalah penulisan ini adalah; Apa saja program aksi Partai Amanat Nasional Pasca Pemilu 2009 di Provinsi Riau?

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif, Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan didepan bersifat fleksibel dan subjek to change sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan. Sehingga fokus penelitiannyapun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah (Moleong, 1990).

## **TINJAUAN TENTANG PAN**

PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1988 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) (Selengkapnya di Sejarah Partai Amanat Nasional)

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

## **TINJAUAN TENTANG PEMILU**

Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

Inti dari demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sistem pemerintahan yang demokratis seperti itulah yang tidak akan terhapus dari muka bumi. Dengan perkataan lain itulah sistem yang terbaik bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Secara umum dikenal empat rumpun sistem pemilu: pluralitas-mayoritas, proporsional representatif, campuran antara pluralitas-mayoritas dan proporsional, serta sistem lainnya. Keempat rumpun ini melahirkan sedikitnya 12 sistem utama, dimana setiap sistem pemilu memiliki varian masing-masing dan diterapkan secara berbeda di berbagai negara di dunia. Dilihat dari variannya maka ada banyak sekali varian sistem pemilu sehingga jumlahnya menjadi tidak terhitung. Kesemua varian tersebut diciptakan dengan satu tujuan utama: menutupi kelemahan atau kekurangan dari sebuah sistem pemilu dengan tetap mempertahankan kelebihan atau kekuatannya. Sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia saat ini adalah proporsional representatif dengan daftar (list proportional representative), diterapkan di 70 dari 213 negara di dunia. Sistem ini memiliki beberapa varian, di antaranya daftar tertutup, daftar setengah terbuka, dan daftar terbuka.

Pemilu legislatif yang baru saja berlangsung pada pilleg DPR, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2009 termasuk ke dalam varian proporsional representatif dengan daftar terbuka. Pengertian terbuka atau tertutup merujuk kepada ada atau tidak adanya kebebasan pemilih dalam menentukan kandidat yang didukungnya

Pemilu legislatif tahun 2009 untuk memilih anggota legislatif Kota Makassar dilaksanakan dengan format yang baru berbeda dengan pemilu tahun 2004, untuk pertama kalinya penggunaan sistem pemilu untuk memilih anggota legislatif menggunakan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak, dimana sistem pemilu ini lebih mengedepankan keterbukaan yaitu masyarakat bisa memilih sendiri caleg yang mereka dukung. UU yang digunakan untuk pemilu tahun

2009 yaitu UU pemilu no. 10 tahun 2008 mengenai sistem pemilu legislatif DPR, DPD dan DPRD , sistem pemilu yang digunakan untuk pemilu tahun 2009 adalah sistem proporsional dengan daftar terbuka.

Penetapan pemenang di dalam pemilu ini menggunakan sistem suara suara terbanyak. Sehingga ambang batas perlemen yang semula digunakan untuk DPR RI sebesar 2,5 % tidak diberlakukan untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota. Sistem proporsional daftar terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai drajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingakat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu.

Ada kelebihan dan ada kelemahan sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional didalam memilih caleg yang didukung.

Sedangkan kelemahan sistem proporsional daftar terbuka yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat ialah suara terbanyak memberikan potensi para caleg menggunakan kekayaanya untuk melakukan pendekatan-pendekatan finansial yang bertujuan untuk memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat, suara terbanyak jika dipandang dari sisi keadilan keterwakilan untuk menetapkan caleg sangatlah adil, namun dengan suara terbanyak pula dapat timbul perilaku caleg yang mengandalkan modal untuk mempengaruhi massa. Sehingga akan muncul pendukung-pendukung caleg yang gampang untuk dimobilisasi demi kepentingan caleg. Pendekatan finansial pula yang dapat melahirkan perilaku memilih yang tidak sehat di tengah-tengah masyarakat pemberian-pemberian yang diberikan oleh caleg sangat berpengaruh untuk masyarakat saat memilih, sehingga yang nampak ialah perilaku memilih yang tidak berdasarkan idealisme serta pola pikir yang rasional dari masyarakat atau singkatnya melahirkan perilaku memilih yang pragmatis.

Pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk menyeleksi caleg-caleg yang mempunyai potensi serta kapasitas untuk mewakili aspirasi rakyat, sudah seharusnya caleg yang menjadi wakil rakyat adalah orang-orang yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap konstituenya, sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memilih mana caleg yang terbaik dari sekian banyak caleg yang mengikuti pemilu. Namun sangat menguatirkan apabila caleg yang dihasilkan pada saat pemilu merupakan caleg yang lahir dari kampanye-kampanye finansial dan pilihan-pilihan pragmatis pada saat pemilu. Pilihan-pilihan yang terjadi dikarenakan pemberian dari caleg sehingga mengkesampingkan idealism sendiri untuk memilih mana caleg yang terbaik untuk menyalurkan aspirasi.

Adanya perubahan sistem pada pemilu tahun 2009 mempunyai konsekuensi terhadap perubahan perilaku memilih juga. Jika sebelumnya, para pemilih hanya memperhatikan parpol saja, dengan adanya perubahan sistem ini, para pemilih juga bisa memperhatikan orang-orang yang dicalonkan oleh parpol tersebut. Pemilu tahun 2009 untuk memilih anggota DPRD Kab/Kota di laksanakan dengan cara atau format

berbeda dari sistem pemilu tahun 2004, dimana saat pemilu tahun 2004 masyarakat hanya dapat memilih partai yang kemudian partai menentukan caleg berdasar nomor urut sebagai wakil rakyat. Namun dipemilu tahun 2009 pemenang ditetapkan dengan suara terbanyak tidak hanya itu pada saat pemilu masyarakat selain dapat memilih partai politik juga dapat memilih orang perorang, untuk pemilu 2014 juga tidak banyak perubahan dari Pemilu 2009 karena masih berpedoman pada hasil yang cukup baik pada Pemilu 2009.

## **PILIHAN PUBLIK**

Kesadaran bahwa ada pertautan antara disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik sudah lama dikemukakan oleh ekonom. Perbedaan keduanya adalah politisi pada dasarnya lebih mengedepankan kepentingan umum (public interests), sedangkan pelaku ekonomi umumnya lebih mendahulukan kepentingan pribadi (private interests). Namun keduanya tidak selalu menjadi dikotomi, bisa dikombinasikan. Inilah awal mula lahirnya cabang ilmu ekonomi yang disebut public choice, yang di era modern digagas Duncan Black (1948), James Buchanan (1949), dan Kenneth Arrow (1950, 1951), Anthony Downs (1957), James Buchanan dan Gordon Tullock (1962), serta Mancur Olson (1965).

Austrian Economics dan public choice theory adalah dua teori besar yang menjelaskan kegagalan pemerintah dalam mengatur perekonomian. Menurut Austrian Economics, perekonomian selalu dinamis dan berubah setiap waktu. Terdapat *time lag* antara identifikasi masalah ekonomi, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan dampak kebijakan terhadap perekonomian. Secara umum, diperlukan waktu antara 2-3 tahun bagi pemerintah untuk mengidentifikasi masalah ekonomi dan mulai mengimplementasikan kebijakannya.

Dalam konteks tersebut, Kirzner menyatakan bahwa diperlukan waktu paling cepat 1-2 tahun tambahan untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan tadi. Permasalahannya, karena perekonomian berkembang dinamis, seringkali kebijakan yang diterapkan tidak lagi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi perekonomian ketika itu<sup>1</sup>. Didasarkan pada public choice theory, dalam sebuah negara demokrasi, keputusan merupakan hasil interaksi kolektif antar berbagai elemen dalam sistem demokrasi tersebut.

Dalam suatu negara demokrasi, kebijakan pemerintah adalah hasil interaksi dari kelima unsur demokrasi tersebut dan sayangnya para aktor tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda dan tidak jarang bertentangan satu dengan yang lain. Adalah wajar jika terjadi bargaining dan tarik ulur dari masing-masing pihak selama proses penetapan kebijakan tersebut. Tak pelak bahwa kebijakan yang dihasilkan akan cenderung suboptimum, karena apapun kebijakan yang dibuat harus memuaskan semua pihak<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Kirzner, I, 1992, "*Meaning of Market Process; Essay in Development of Modern Austrian Economics*", Routledge.

<sup>2</sup> Mueller, D, 1978, "*Public Choice*"; second edition, Cambridge UP.

Dalam penjelasan Didik J. Rachbini dan Arifin<sup>3</sup>, public choice selalu menekankan pada penilaian keputusan-keputusan rasional baik oleh individu maupun masyarakat atau keputusan pemerintah. Oleh karenanya, konsep tentang pilihan public selalu bersinggungan dengan teori tentang pilihan rasional. Bagi teori pilihan rasional, kebijakan publik adalah hasil interaksi politik di antara pelaku rasional yang ingin memaksimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Politik, dengan demikian, dianggap sebagai sebuah panggung dimana semua pihak bersaing untuk mengeruk berbagai sumber yang ada di arena publik<sup>4</sup>. Dengan kata lain, Perjuangan kepentingan individu para politikus tersebut di samping bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau mereka yang diwakilinya, bisa juga menciptakan hal-hal yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.

## **PROGRAM AKSI PAN DALAM PENINGKATAN RASIONALITAS PEMILIH**

Pemilu 2009 memberikan gambaran strategis kepada Partai politik akan peran dan kedudukannya dalam pemerintahan. Terpilihnya wakil-wakil partai dalam parlemen memberikan gambaran bahwa kinerja kader maupun partai tidak cukup dari sekedar membangun pencitraan dan popularitas partai dan kandidat. Maka program aksi PAN pasca pemilu 2009 adalah membangun rasional pemilih dengan melakukan program pendidikan politik pemilih.

Asumsi Rasionalitas merupakan anggapan bahwa manusia akan melakukan sesuatu secara rasional, yang tidak memberikan kerugian pada dirinya sendiri. Dengan kata lain manusia akan bersifat rasional dalam menentukan semua hal yang dapat bermanfaat untuk diri pribadinya. Seperti dalam ilmu ekonomi tentang prinsip dalam ekonomi adalah memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan serendah-rendahnya.<sup>5</sup> Rasionalitas dapat juga diartikan sebagai suatu pengambilan keputusan yang paling disukai.<sup>6</sup> Prinsip ekonomi tersebut juga diterapkan manusia dalam kehidupan politik. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang tertentu yang menggerakkan roda pemerintahan. Implementasi penerapan rasionalitas ini terdapat pada waktu pemilihan umum yang akan menentukan siapa yang akan memegang jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan. Pejabat yang memiliki kekuasaan, kewibawaan, kekayaan mungkin akan berpeluang untuk dipilih rakyatnya. Hal ini tergantung dari rasionalitas yang dipakai oleh para pemilih.

Dalam kontestasi politik, kemenangan partai politik (PAN) sangat ditentukan oleh jumlah pemilih yang akan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Hal itu bisa disebabkan karena calon dan partai tersebut mempunyai kewibawaan yang dapat

---

<sup>3</sup> Lihat Didik J. Rachbini dan Arifin, ““Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik”, 2001, h.19.

<sup>4</sup>Rizal Malarangeng, 2008,“Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992”, Gramedia, Jakarta, h.9.

<sup>5</sup>Diah Lukita Sari. Dkk, “Perilaku Konsumen”, <http://ekonomi-syariah.com> diunduh pada 28 April 2010

<sup>6</sup>Victor Siagian, “Penggunaan Model dalam Teori Ekonomi Demokrasi : Kasus Kebijakan Pemerintah”, <http://www.trisakti.ac.id> diunduh pada 28 April 2010

menjadi panutan, atau bisa saja calon tersebut sangat terkenal dengan gelar yang dimiliki. Marketing dalam Pemilu akan membuka peluang terpilihnya seorang calon, tergantung apa yang bisa dijual dari para kandidat tersebut. Ada empat elemen yang menjadi isu utama dalam Pemilu yaitu produk, promosi, tempat dan harga, yang diukur dari indikator platform partai, rekam jejak, personal, dan karakter calon.<sup>7</sup> Dari sisi platform partai dapat menarik jumlah pemilih yang signifikan, terkadang pilihan politik masyarakat juga didasarkan pada partai pengusung walaupun dalam beberapa survei pilihan politik yang berdasarkan pada platform partai ini jumlahnya tidak signifikan. Dari sisi rekam jejak, ini menjadi hal pokok yang sangat penting bagi pemilih. Pilihan berdasarkan rekam jejak bobotnya lebih besar dibandingkan dengan pilihan politik masyarakat berdasarkan platform partai. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting ketika parpol menentukan pilihan calon berdasarkan rekam jejak yang baik. Apalagi masyarakat kita mempunyai kecenderungan lebih sensitif terhadap persoalan etika dan moral calon pemimpinnya. Dari sisi personal juga menjadi penting, hal ini merupakan indikator penting yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap Pilkada. Sisi personal calon menjadi referensi utama pemilih melakukan pilihan politik, secara teoritik elektabilitas kandidat salah satu unsurnya adalah *personality* (kepribadian) calon menjadi salah unsur yang menjadi alasan pemilih. Dari sisi karakter calon.

Hal ini terkait erat dengan persoalan kemampuan mediasi dan komunikasi politik. Calon yang memiliki karakter baik cenderung mempunyai pola komunikasi politik vertikal dan horizontal yang baik. Hal ini menjadi poin penting untuk merekrut pemilih yang masih tinggi sentimen primordialnya. Keempat elemen tersebut akan sangat menentukan terpilihnya calon kepala daerah yang bersangkutan. Seperti pencalonan para artis yang terjun di dunia politik.

Rasionalitas pemilih didasarkan atas pendidikan yang dimiliki oleh warga setempat, keterjangkauan informasi dan akses kampanye, serta tingkatan umur pemilih. *Pertama* adalah tingkat pendidikan, apakah rata-rata pendidikan para pemilih itu rendah atau tinggi. Jika rata-rata pendidikan yang dituntaskan oleh para warga setempat yang terdaftar sebagai pemilih tinggi, dapat diasumsikan bahwa rasionalitas pemilih dalam pilkada didasarkan karena calon terpilih memiliki kompetensi atau kemampuan untuk mengatur daerahnya ke arah yang lebih baik dan dianggap layak untuk memimpin atau mengatur daerahnya. Jika pendidikan rata-rata pemilih rendah, dapat diasumsikan bahwa tindakan pemilih didasarkan karena pasangan calon terpilih merupakan orang yang sudah dikenal atau populer tidak hanya di kalangan masyarakat setempat tetapi juga di seluruh Indonesia, mengingat salah satu calon pasangan tersebut adalah seorang artis.

Berdasarkan data yang ada, pemilih Riau sebagian besar diantara mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu setingkat pendidikan menengah saja. Dengan demikian, pemilih dalam Pilkada Riau dapat diasumsikan bahwa mereka memilih bukan karena mengerti dengan program kerja dan visi-misi, namun lebih

---

<sup>7</sup>Arizka Warganegara, "Inovasi dan Produk dalam Pilkada", <http://arizka-giddens.blogspot.com> diunduh pada 27 April 2010

dikarenakan mereka lebih mengenal sosok. Jadi, rasionalitas pemilih tersebut didasarkan pada preferensi masyarakat terhadap calon terpilih.

*Kedua*, dilihat dari segi keterjangkauan informasi dan akses kampanye. Pemilih yang rasional dapat diasumsikan dapat membuat keputusan pilihan yang rasional bila memiliki informasi yang cukup terhadap calon yang akan dipilihnya. Ini sesuai dengan asumsi *bounded rationality*, dimana manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui semua informasi yang ada, sehingga manusia telah dapat dikatakan rasional bila telah berusaha untuk mencari informasi yang ada. Pemilih yang kekurangan akses informasi mengenai kualitas calon yang diajukan akan cenderung memilih calon yang mereka kenal saja. Situasi di mana pemilih masih belum rasional dan mempunyai akses informasi dan pengetahuan politik yang sangat terbatas membuka kesempatan dan mendorong para partai politik untuk mencari jalan pintas dan mudah untuk menang dalam pemilu. Hal ini terjadi di Pilkada Riau 2008 lalu, kurangnya akses informasi ke seluruh daerah pemilihan membuat partai politik mengajukan calon yang memang sudah dikenal masyarakat agar pilihan masyarakat terkumpul pada suara calonnya. Akibatnya, Banyak calon yang diajukan parpol bukan karena kualitas, tetapi karena popularitas. Ekspektasinya adalah pemilih yang belum rasional atau kekurangan informasi mengenai kapasitas dan kapabilitas politik calon, mau tidak mau akan memilih calon yang mereka kenal dan populer.

Rasionalitas pemilih sangat tergantung kepada sejauh mana pemilih mengetahui secara detail mengenai program-program kerja yang ditawarkan dan mengetahui informasi terkait calon, seperti visi-misi. Upaya yang dilakukan guna mensosialisasikan visi-misi dan program kerja mereka adalah melalui kampanye yang dilakukan secara indoor maupun outdoor, seperti data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kampanye dilakukan di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan saja. Jadi, hampir sebagian besar pemilih tidak mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengenal Hade secara detail dari segi program-program dan visi-misi yang ditawarkan. Hal ini tentu menyulitkan pemilih, namun demikian

*Ketiga*, preferensi kalangan muda dan pemilih pemula. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar pemilih adalah kalangan muda dan pemilih pemula. Kalangan muda adalah golongan yang diibaratkan sangat peduli dan memiliki semangat demokrasi yang masih tinggi sehingga kecenderungan mereka memilih masih sangat tinggi, begitu pula para pemilih pemula yang kebanyakan adalah kalangan pelajar dan mahasiswa. Kecenderungan pemilih pemula dan kalangan muda tentu akan lebih menyukai calon yang memiliki karakter jiwa muda, agen pembaharu, populer, dan akrab dengan dunia mereka.

Program aksi PAN dalam meningkatkan rasionalitas pemilih itu dilakukan dalam beberapa tahap; Pertama Rekrutmen Kader. Tahap ini dimulai dari tingkat struktur partai terbawah yaitu dari dewan pimpinan ranting partai yang kemudian diteruskan ke tingkat dewan pimpinan cabang, dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan wilayah. Tahap kedua adalah melakukan penanaman karakter PAN melalui Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD), Latihan Kader Amanat Madya (LKAM) dan Latihan Kader Amanat Utama (LKAU). Tahap ketiga adalah memberikan tanda keanggotaan dan kader.



Secara perlahan program aksi itu memang meningkatkan jumlah anggota dan kader PAN serta meningkatkan popularitas PAN. Selain program internal itu, PAN juga mengagendakan program-program strategis yang diintegrasikan dalam program pembangunan daerah yang disalurkan melalui kebijakan-kebijakan daerah yang kemudian diperjuangkan oleh kader PAN di parlemen. Program-program itu yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur guna mendukung peningkatan akses dan distribusi barang dan jasa, program pembangunan sumber daya manusia, program pembangunan bidang kesehatan, program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan program pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## **PENUTUP**

Masyarakat sebagai pemilih diberi hak untuk memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan mereka. Pemilih dikatakan rasional bila memilih dengan mempergunakan informasi yang cukup untuk memilih calon yang ada. Rasionalitas pemilih sangat dipengaruhi keterjangkauan informasi yang mereka dapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Didik J. Racbini dan Arifin, ““Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik”, 2001
- Kirzner, I, 1992, “*Meaning of Market Process; Essay in Development of Modern Austrian Economics*”, Routledge.
- Mueller, D, 1978, ” *Public Choice*”; second edition, Cambridge UP.
- Rizal Malarangeng, 2008, “Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992”, Gramedia, Jakarta
- Arizka Warganegara, “Inovasi dan Poduk dalam Pilkada”, <http://arizka-giddens.blogspot.com>
- Victor Siagian, “Penggunaan Model dalam Teori Ekonomi Demokrasi : Kasus Kebijakan Pemerintah”, <http://www.trisakti.ac.id>
- Diah Lukita Sari. Dkk, “Perilaku Konsumen”, <http://ekonomi-syariah.com>